

**PERHITUNGAN DAN TATA CARA PEMOTONGAN PPH PASAL 21
ATAS ANGGOTA POLRI PADA POLRES BARITO UTARA
KALIMANTAN TENGAH**

Winda Dewi Nurhanisa

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : justwind3099@gmail.com

Sustinah Limarjani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the calculation of PPh Article 21 and to know the procedures for withholding Income Tax Article 21 on the income of Polri members at the North Barito Police Station, Central Kalimantan.

The results of this study indicate that: First, make a comparison between the calculation of PPh Article 21 of the North Barito Police, namely using the GPP application which is automatically calculated with manual calculations taught during lectures. The calculation of the North Barito Police is in accordance with the applicable laws and regulations. Second, the procedure for deductions at the North Barito Police, namely the Paying Officer makes monthly deductions by inputting the income of Polri members in the GPP application which will be deducted automatically. Then, the Paying Officer uses the SAS application to issue the relevant monthly salary SPM as BUN, then it is printed and sent to the KPPN. The payroll process is carried out until the SPPD is issued by the KPPN and will be forwarded to the BRI Bank account of each member.

Keywords: Income Tax Article 21, Calculation of Income Tax Article 21, Withholding Procedures

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 dan mengetahui tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan anggota Polri pada Polres Barito Utara Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, melakukan perbandingan antara perhitungan PPh Pasal 21 Polres Barito Utara yaitu menggunakan aplikasi GPP yang secara otomatis dengan perhitungan secara manual yang diajarkan saat kuliah. Perhitungan Polres Barito Utara sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. **Kedua**, tata cara pemotongan di Polres Barito Utara yaitu Juru Bayar melakukan pemotongan tiap bulannya dengan menginput penghasilan Anggota Polri di aplikasi GPP yang akan terpotong secara otomatis. Kemudian, Juru Bayar menggunakan aplikasi SAS untuk menerbitkan SPM gaji bulan berkenaan sebagai BUN, kemudian dicetak dan dikirimkan ke KPPN. Dilakukan proses penggajian sampai dengan dikeluarkannya SPPD oleh KPPN dan akan diteruskan ke rekening Bank BRI masing-masing anggota.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Perhitungan PPh Pasal 21, Tata Cara Pemotongan

PENDAHULUAN

Pendapatan negara mempunyai sumber penerimaan yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pada Bulan Juni tahun 2020, realisasi Pendapatan Negara dari Penerimaan Perpajakan mencapai Rp624,93 triliun yang terdiri dari Penerimaan Pajak mencapai Rp531,71 triliun dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp93,21 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp184,52 triliun. Dalam hal ini, penerimaan pajak lebih dominan pendapatannya terhadap Negara.

Dalam komponen Penerimaan Pajak, PPh Non Migas masih menjadi yang pertama mengungguli dalam penerimaan pajak lainnya, pajak yang dimaksud adalah PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri atas penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan, jasa, maupun kegiatan meliputi gaji, tunjangan, upah, honorarium, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh bendahara pemerintah yang mana akan melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Penghasilan gaji yang diterima oleh Anggota Polri berbeda-beda karena ditentukan adanya pangkat dan golongan. Semakin tinggi pangkat dan golongan akan mendapatkan penghasilan gaji yang cukup besar. Polres Barito Utara memiliki Bendahara khusus, di mana ada unit tersendiri yang melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran, serta pelaporan SPT PPh Pasal 21 terhadap seluruh pegawainya.

Dari hasil pengamatan, terdapat perbedaan dalam perhitungan gaji anggota polri berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi dibandingkan dengan perhitungan manual.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan anggota POLRI dan tata cara pemotongan PPh Pasal 21 pada Polres Barito Utara.

Dalam hal ini, penulis akan membuat judul tugas akhir yaitu “Perhitungan dan Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas Anggota Polri pada Polres Barito Utara Kalimantan Tengah”.

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Unsur Unsur Perhitungan Gaji PPh Pasal 21 atas Anggota Polri sebagai Dasar PPh Pasal 21 pada Polres Barito Utara Kalimantan Tengah

SPT Tahunan yang digunakan oleh Polres Barito Utara adalah formulir 1721-A2. Langkah pertama yang perlu dilakukan penulis yaitu mengumpulkan semua informasi tentang penghasilan yang diterima oleh Anggota Polisi, hal ini dilakukan untuk menentukan penghasilan dan tunjangan apa saja yang termasuk objek pajak yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan. Penulis juga menganalisis biaya-biaya, iuran-iuran, PTKP serta tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada anggota polisi melalui perhitungan manual, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapannya telah sesuai dengan yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 Bab Gaji menjelaskan:

- 1) Penjabaran penghasilan yang diterima oleh Anggota Polisi yaitu:
 - a. Gaji Pokok

Anggota Kepolisian menerima gaji berupa gaji pokok yang ditentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 dengan melihat MKG, Golongan, dan Pangkat. Penghasilan yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan, Gaji Pokok adalah objek PPh Pasal 21.

b. Tunjangan

Tunjangan yang diterima oleh polisi yaitu :

- (1) Tunjangan Istri/Suami yaitu terdapat pada PP No 29 Tahun 2001 Pasal 12, Anggota Polisi yang memiliki Istri/Suami akan diberikan tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok;
- (2) Tunjangan Anak yaitu terdapat pada PP No 29 Tahun 2001 Pasal 12, Anggota Polisi yang memiliki anak sebesar 2% dari gaji pokok maksimal 2 anak;
- (3) Tunjangan Struktural adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Anggota Polisi yang diangkat dalam jabatan struktural yang mana memiliki tanggung jawab, tugas, wewenang dalam rangka memimpin suatu organisasi. Tunjangan ini diberikan berdasarkan eselon jabatan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Berikut tunjangan jabatan struktural :
I A Rp 5.500.000, I B Rp 4.375.000, II A Rp 3.250.000,
II B Rp 2.025.000, III A Rp 1.260.000, III B Rp 980.000,
IV A Rp 540.000, IV B Rp 490.000, dan V A Rp 360.000;
- (4) Tunjangan Beras ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-3/PB/2015 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. Uang yang ditetapkan sebesar Rp 8.047,00 per kilogram, anggota polri akan mendapatkan 18kg, istri/suami 10kg, dan anak 10kg. Namun, tunjangan beras di Polres Barito Utara masih menggunakan beras bukan uang;
- (5) Tunjangan lain lain berupa Tunjangan Lauk Pauk atau ULP sehari Rp 60.000 dikali dengan jumlah hari dalam setiap bulan;

2) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu :

a. Biaya Jabatan

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 menurut penulis, Biaya jabatan akan digunakan dalam hitungan pengurangan. Biaya Jabatan dikenakan 5% dari Penghasilan Bruto, untuk setiap bulannya maksimal Rp 500.000 dan untuk setahun sebesar Rp 6.000.000.

b. IWP (Iuran Wajib Pajak)

Dalam perhitungan Polres Barito Utara, IWP dikenakan sebesar 8% (4,75% untuk program pensiun dan 3,25% untuk tunjangan hari tua) dari gaji pokok + tunjangan.istri / suami + tunjangan anak. Dalam Perundang – Undangan Perpajakan , perhitungan yang menjadi pengurang adalah $4,75\% \times (\text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan Istri} + \text{Tunjangan Anak})$

c. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)

BPJS ditentukan subsidi oleh pemerintah. Dalam Perundang – Undangan Perpajakan, bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

d. Potongan Beras

Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Polres Barito Utara, Potongan Beras akan digunakan dalam pengurangan. Namun, dalam perhitungan PPh Pasal 21 menurut penulis tidak dihitung.

e. Sewa rumah dinas

Perhitungannya adalah 2% dari gaji pokok. Dalam Perundang – Undangan Perpajakan, bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

3) PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Untuk diri anggota polisi dalam satu tahun Rp 54.000.000, status kawin Rp 4.500.000, dan anak Rp 4.500.000. Dalam Perundang-Undangan Perpajakan, PTKP maksimal menanggung 3 anggota keluarga. Sedangkan PP Polri, PTKP maksimal menanggung 2 anggota keluarga.

4) Tarif PPh Pasal 21

- a) Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000 sebesar 5%
- b) Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 sebesar 15%
- c) Rp 250.000.000 sampai dengan RP 500.000.000 sebesar 25%
- d) Di atas Rp 500.000.000 sebesar 30%

4.1.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Anggota Polri di Polres Barito Utara Menurut Perhitungan Polres dan Penulis

Perhitungan Polres Barito Utara menggunakan Aplikasi GPP. Hal ini untuk mencari

penghasilan bersih yang akan diterima oleh masing masing Anggota Polri. Perhitungan Polres Barito Utara bukan mencari darimana PPh yang didapat. Maka dari itu, penulis ingin membuktikan dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang berlaku. Berikut adalah perhitungan yang digunakan Polres Barito Utara dan perhitungan oleh penulis

- a. Dodo Hendro Kusuma, SIK dengan pangkat/ eselon AKBP/ III A, Golongan dan MKG (4B16) dan jabatan Kapolres Barito Utara, dengan status kawin mempunyai dua anak.

Tabel 4.1

Perhitungan Gaji Dodo Hendro Kusuma oleh Polres Barito Utara

Gaji Pokok		3.966.200
Tunjangan Istri		396.620
Tunjangan Anak		158.648
Jumlah (gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak)		4.521.468
Tunjangan Jabatan	1.260.000	
Tunjangan beras	386.256	
Jumlah tunjangan		1.646.256
Jumlah penghasilan bruto		6.167.724
PPh Pasal 21 (ditanggung pemerintah)		86.479
Jumlah penghasilan bruto + PPh Pasal 21		6.254.203
Potongan :		
Potongan Beras	386.256	
IWP (8%)	361.717	
BPJS (ditanggung pemerintah)	57.814	
PPh Pasal 21	86.479	
Sewa Rumah Dinas	79.324	
Jumlah Potongan		971.590
Penghasilan neto		5.282.613
Pembulatan		87
Uang Lauk Pauk		1.800.000
Jumlah penghasilan bersih		7.082.700

Sumber : Daftar Gaji Polres Barito Utara Bulan Juni 2020

Perhitungan PPh Pasal 21 oleh Penulis :

Tabel 4.2

Perhitungan Gaji Dodo Hendro oleh Penulis

Penghasilan Bruto		6.167.724
Tunjangan Lain – lain		1.800.000
Jumlah penghasilan bruto		7.967.724
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% x Peng. Bruto)	398.386	
Iuran Pensiun (4,75% x GaTunKel)	214.769	
Jumlah Pengurangan		(613.155)
Penghasilan Netto		7.354.569
Penghasilan Netto Setahun (x12)		88.254.828
PTKP		67.500.000
PKP Setahun		20.754.828
PKP Setahun yang dibulatkan		20.754.000
PPh Pasal 21 Setahun	5% x 20.754.000	1.037.700
PPh Pasal 21 Sebulan	1.037.700 ÷ 12	86.475

Sumber: Data Diolah

Penulis membuktikan dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang berlaku di Perundangan yang berlaku. Hasil yang didapatkan tidak terlalu materil, yang artinya PPh Pasal 21 dalam perhitungan Polres Barito Utara sudah sesuai karena dibantu adanya aplikasi GPP. Perhitungan Polres Barito Utara menggunakan Potongan berupa Potongan Beras, IWP 8%, BPJS, PPh Pasal 21, dan Sewa Rumah Dinas. Sedangkan Perhitungan Penulis menggunakan Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun 4,75% sebagai pengurang perhitungan.

4.1.3 Pemotongan Gaji

Pemotongan di Polres Barito adalah menginput gaji pokok yang berdasarkan Skep yang dikeluarkan oleh Bagian Sumber Daya Manusia dari Polda maupun Polres. Penambahan Tunjangan Keluarga (Istri/Suami sebesar 10%, anak 2%) berdasarkan Surat Nikah, Kartu Keluarga, Akte Lahir, Surat Keterangan Kuliah bagi anak yg berumur 20 sampai dengan 25 tahun yang dikeluarkan pihak berwenang. Setelah dinyatakan lengkap, langkah selanjutnya melakukan penginputan ke Aplikasi GPP dan Aplikasi SAS. Selanjutnya, Arsip Dokumen Komputer tersebut dicetak kemudian dikirimkan ke KPPN sebagai Bendahara Umum Negara untuk dilakukan proses penggajian sampai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN, yang diteruskan ke rekening Bank BRI masing-masing pegawai.

Tata cara pemotongannya adalah Juru Bayar wajib memotong PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap bulannya. Kemudian, Juru Bayar akan menginput gaji melalui Aplikasi GPP dan

SAS, dan PPh Pasal 21 akan langsung terpotong secara otomatis dan Juru Bayar akan menyetorkan pada Surat Perintah Membayar gaji bulan berkenaan sebagai Bendahara Umum Negara, sehingga Juru Bayar tidak melakukan penyetoran ke Bank Persepsi.

4.2 Pembahasan

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Polres Barito Utara dihitung dan dipungut setiap bulannya. Kemudian, Juru Bayar akan menginput gaji melalui Aplikasi GPP dan SAS.

Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) merupakan aplikasi pembuat daftar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat, aplikasi ini dibuat oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai salah satu direktorat dibawah naungan Direktorat Jendral Perbendaharaan. Aplikasi ini termasuk aplikasi yang multifungsi, selain membuat daftar gaji, juga menyimpan data pegawai lengkap, adapun kegunaan lain Aplikasi ini yaitu membuat kekurangan gaji (rapel), gaji susulan, uang duka (untuk PNS yang meninggal dunia), Uang Makan dan Uang lembur, mencetak KP4 (Surat Keterangan untuk menambahkan keluarga dalam gaji), mencetak Rekap SPT Tahunan pegawai, dan mencetak Surat Keterangan Penghasilan. Dengan adanya aplikasi gaji ini jelas sangat membantu, karena tidak seperti mengerjakan secara manual yang harus benar-benar mengerjakan dari awal sampai akhir, setiap angka-angka dan akunakun akan terotomatis dengan sendirinya karena sudah terprogram. Kemudian pengertian dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) adalah aplikasi utama yang digunakan oleh satuan kerja yang merupakan pengguna layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia.

PPh Pasal 21 akan langsung terpotong secara otomatis dan Juru Bayar akan menyetorkan pada Surat Perintah Membayar gaji bulan berkenaan oleh Bendahara Umum Negara, sehingga Juru Bayar tidak melakukan penyetoran ke Bank Persepsi. Untuk bulan Desember, bukti potong 1721-A2 akan diberikan kepada pegawai tetap.

KESIMPULAN

- 1) Polres Barito Utara telah melakukan perhitungan dan tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetapnya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang perpajakan.
- 2) Perhitungan PPh Pasal 21 antara Polres Barito Utara dan Penulis hanya selisih sedikit, karena terjadi perbedaan perhitungan aplikasi dan manual.
- 3) Polres Barito Utara melaksanakan *Witholding Tax System*, karena sistem ini mengharuskan Polres Barito Utara melakukan pemotongan PPh Pasal 21 di aplikasi GPP dan SAS atas penghasilan Anggota Polri yang aktif bekerja di tempat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriadi, Primandita. Yuda Aryanto., dan Agus Puji Priyono. 2018. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat

Hidayat, Nurdin dan Dedi Purnawa ES. 2017. *Perpajakan Teori dan Praktik Edisi 1 Buku 1*. Jakarta: Rajawali Pers

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2019-2020. “ *APBN Kita Bulan Juni, Juli 2019 dan 2020* ”

Lubis, Rahmat Hidayat. 2018. *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI

Politika Tim. 2019. *Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh)*. Yogyakarta: Politika Publishing

Polres Barito Utara Kalimantan Tengah. 2020. “ *Daftar Gaji Anggota Polri Bulan Juni 2020* ”

Polres Barito Utara Kalimantan Tengah. 2020. “ *Struktur dan Tugas Anggota Polri Bulan Juni 2020* ”

Rangkuti, Indra Efendi dkk. 2018. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi 2*. Medan: Madenatera

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Praktik Edisi 9 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

TMBOOKS. 2019. *Pajak Penghasilan – Peraturan, Perhitungan, dan Pelaporan*. Yogyakarta: ANDI

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Republik Indonesia. *Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2015 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang*.

Republik Indonesia. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Jabatan Struktural*

Surat Edaran yang dikeluarkan *Direkturat Jenderal Perbendaharaan “SE Nomor SE-25/PB/2018” Tentang Uang Lauk Pauk Anggota TNI dan POLRI*